



Khawatirkan Minat Vaksinasi Rendah

Pemprov Siapkan Strategi Sikapi Wacana Vaksin Berbayar

JOGJA, Radar Jogja - Pemprov DIJ akan menyiapkan langkah strategi baru untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 khusus dosis ketiga atau *booster*. Ini menyusul informasi adanya rencana vaksinasi Covid-19 berbayar untuk kelompok non penerima bantuan iuran (PBI). Usai tidak lagi dialokasikan anggaran khusus Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2023.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara

Aji mengatakan, jika nantinya informasi itu benar adanya menjadi keputusan pusat, maka diperlukan strategi baru di daerah. Bagaimana agar vaksinasi tetap bisa dinikmati masyarakat meskipun berbayar di tahun 2023. "Kami harus memikirkan strategi untuk menarik minat masyarakat, kalau memang vaksinasi Covid-19 benar-benar berbayar tahun depan," katanya kemarin (21/8).

Aji menjelaskan sebetulnya akan ada permasalahan baru muncul jika kebijakan tersebut akan diterapkan. Dikhawatirkan minat masyarakat untuk vaksinasi menjadi rendah. Terlebih saat ini *booster* masih belum juga diminati masyarakat. Sehingga capaian-

nya di DIJ masih tergolong rendah. "Kalau vaksin saya kira kemudian berbayar, ada masalah. Karena sementara ini yang tidak berbayar, banyak yang tidak diminati, terutama *booster*. Kalau berbayar, tentu menjadi semakin sedikit orang datang untuk vaksinasi," ujarnya.

Maka, menyikapi wacana tersebut diperlukan strategi baru agar masyarakat tetap mengakses vaksinasi *booster* terutama. Pemprov DIJ bisa saja memberikan insentif bagi mereka yang sudah vaksinasi. Namun skema itu belum dikaji lebih lanjut termasuk insentif apa yang akan diberlakukan. Opsi selanjutnya ialah sertifikat vaksinasi Covid-19 dijadikan sebagai syarat untuk mengurus administrasi. Atau

dengan mewajibkan *booster* bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan publik tertentu. Dengan demikian, vaksinasi Covid-19 mau tidak mau wajib dijalani masyarakat. "Misalnya dengan insentif atau dengan pemaksaan. Kalau paksa misalnya saja orang tidak boleh melakukan perjalanan (kalau belum *booster*), tidak boleh mengurus KTP atau berkas lainnya. Jadi harus sudah vaksin," jelasnya.

Dikatakan masyarakat diminta saat ini segera memanfaatkan pelayanan vaksinasi yang disediakan pemerintah. Terlebih masih gratis dan tidak dipatok tarif tertentu. Masyarakat cukup mendatangi sentra-sentra vaksinasi di fasyankes masing-masing.

Seperti puskesmas dan rumah sakit yang tersebar di lima kabupaten/kota. "Saya kira masyarakat perlu memanfaatkan mumpung vaksin gratis dan tersedia dengan sangat banyak. Maka ayo berbondong-bondong vaksin daripada besok harus bayar," terangnya.

Saat ini pemprov masih fokus percepatan vaksinasi *booster* satu untuk masyarakat umum dan *booster* kedua untuk sumber daya manusia kesehatan (SDMK). "Capaian vaksinasi *booster* di DIJ baru menyentuk 39,98 persen dengan 1,1 juta orang ter vaksin. Dari targetnya sebanyak 3,2 juta penduduk DIJ harus menjalani vaksinasi *booster*," katanya.

Sementara Kepala Bagian Humas Biro UHP Pemprov DIJ Ditya Namaryo Aji menambahkan untuk vaksin dosis pertama dan kedua telah melampaui target yang ditetapkan dengan lebih dari 3,2 juta penduduk ter vaksin. Capaian *booster* per wilayah adalah Kota Jogja 96 persen, Sleman 41 persen, Gunungkidul 33 persen, Bantul 26 persen, dan Kulon Progo 27 persen. Sedangkan capaian *booster* kedua sekitar 61 persen. Atau lebih dari 20,7 ribu SDMK menjalani vaksinasi. Mereka yang menerima vaksin dosis keempat ini baru difokuskan untuk tenaga kesehatan dan pegawai administratif di fasyankes. (wia/bah/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005